

Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024

*Syifa Rianadiwa¹, Faiz Solakhudin², Virgano Triadi Salam³, Nurlaili Rahmawati⁴

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, rianadiwasyifa@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, zhoejhah@gmail.com

³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, virganots@gmail.com

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, rnurlaili086@uinjkt.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Polarisasi Politik,
Pemilu 2024,
Mencegah Polarisasi Politik,
Dampak Polarisasi Politik,
Partai Politik

Article history:

Received : 2024-01-03

Revised : 2024-05-29

Accepted : 2024-06-25

DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v4i01.7548>

ABSTRACT

This article aims to discuss efforts to prevent political polarization in the 2024 election year by using library data collection methods. The results of this research are that political polarization can occur in any situation and condition especially during elections, public policy, socio-cultural issues including post-debate issues for the Presidential and Vice Presidential Candidates. The causes of political polarization are none other than political parties, mass media, regional expansion, political context and society's political ideology. Political polarization has positive and negative impacts. However, of these two impacts, there are more negative impacts. The negative impacts that can be caused by political polarization are the creation of divisions, damage to democratic institutions, loss of credibility of political parties, impact on government, and reduced credibility of society, while the positive impacts of political polarization are strengthening relationships and increasing participation in politics. Political polarization will very easily occur when the public or supporters are easily carried away by issues circulating in society such as differences in ideology, choices and principles between one camp and another. Several efforts can be made to prevent political polarization, namely: the public must be able to sort and choose the issues circulating and not be too fanatical about their choices, instill and implement the values of Pancasila, and implement the value of harmonization of Bhinneka Tunggal Ika.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas upaya pencegahan polarisasi politik di tahun pemilu 2024 dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah polarisasi politik dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apapun utamanya saat pemilu, kebijakan publik, isu-isu sosial budaya termasuk isu pasca debat Capres dan Cawapres. Penyebab terjadinya polarisasi politik tak lain adalah partai politik, media massa, pemekaran wilayah, konteks politik dan ideologi politik masyarakat. Polarisasi Politik mempunyai dampak positif dan negatif. Namun dari kedua dampak tersebut lebih banyak dampak negatifnya. Dampak negatif yang dapat disebabkan terjadinya polarisasi politik yaitu Terciptanya perpecahan, Merusak institusi demokrasi, Menghilangnya kredibilitas partai politik, Berdampak terhadap pemerintahan, serta Menurunnya Kredibilitas Masyarakat sedangkan dampak positif hal dari polarisasi politik yaitu memperkuat hubungan dan Meningkatkan partisipasi dalam politik. Polarisasi politik akan sangat mudah terjadi ketika masyarakat atau para pendukung mudah terbawa isu-isu yang beredar di masyarakat seperti perbedaan ideologi, pilihan dan prinsip antar satu kubu dengan kubu yang lain. Beberapa hal upaya yang dapat mencegah polarisasi politik, yaitu: masyarakat harus dapat memilah dan milih isu yang beredar dan tidak terlalu fanatik terhadap pilihannya, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, dan mengimplementasikan nilai harmonisasi Bhineka Tunggal Ika.

1. PENDAHULUAN

Pemilu 2024 di Indonesia semakin dekat yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, salah satu tantangan terbesar yang ada pada setiap pemilu ialah polarisasi politik. Polarisasi politik bisa membuat rakyat terpecah belah dan berpotensi menyebabkan pertarungan yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk tahu kenyataan polarisasi politik serta mencari cara untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi dampaknya. Polarisasi merujuk di pembagian warga sebagai sekumpulan/kelompok yg saling bertentangan pada pandangan politik, ideologi, nilai, atau agama. dalam konteks pemilu, polarisasi acapkali terjadi saat ada 2 kandidat atau partai yg mempunyai pandangan yg sangat tidak sama, sebagai akibatnya masyarakat terpecah sebagai dua kubu yang saling melawan. Polarisasi politik pernah dialami rakyat Indonesia saat Pemilu Presiden 2019 dimana hanya ada 2 kandidat yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'rif Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hal ini berakibat ada 2 kubu yg saling bertentangan serta muncul julukan kubu cebong dan kampret.¹

Polarisasi dapat mengancam keharmonisan masyarakat, memperburuk perseteruan serta menurunkan kualitas demokrasi dengan memperlemah dukungan terhadap keputusan bersama serta memperkuat sikap oposisi. Polarisasi adalah salah satu istilah yang sering kita dengar di dunia politik. Polarisasi politik adalah pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang berbeda pendapat dalam pandangan dan kebijakan politik. Memasuki tahun politik 2024, polarisasi politik semakin terlihat di masyarakat. Polarisasi membuat masyarakat terbelah kepada berbagai pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada. Polarisasi politik biasanya mencerminkan ketegangan pada ideologi politik biner dan politik identitas partisan. Beberapa ilmuwan politik menjelaskan bahwa polarisasi kontemporer tidak bergantung pada perbedaan kebijakan pada skala kiri atau kanan. Akan tetapi, semakin bergantung pada perpecahan lain seperti paham agama melawan paham sekuler, nasionalis melawan globalis, tradisional melawan modern atau pedesaan melawan perkotaan. Polarisasi juga dikaitkan dengan proses politisasi.

Dalam studi politik, Fenomena polarisasi tidak hanya sebelum pemilu saja, tetapi fenomena polarisasi ini kerap berlanjut pasca pemilu,² di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 dan Pilpres Tahun 2019. Pemilu tersebut memang berkaitan, karena menjadi arena Pertarungan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, baik secara langsung pada Pilpres 2014 dan 2019, maupun tidak langsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Polarisasi ini juga sering kita jumpai didalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, Basuki Cahya Purnama (Ahok) merupakan sosok yang berafiliasi dengan kubu Jokowi, di klaim tidak memiliki hak memimpin politik yang mayoritas islam karena ia beragama kristen dan dari etnis tionghoa indonesia. Sedangkan lawan politiknya adalah Anis Baswedan sosok yang merupakan afiliasi dari Prabowo Subianto dan juga ia terafiliasi dengan kelompok kelompok islam yang menentang Ahok. Polarisasi pula dapat menghasilkan proses keputusan menjadi sulit dan mengganggu stabilitas politik. Ketidakpercayaan pada pemerintah dan institusi juga semakin tinggi sebab polarisasi, mirip media dan lembaga penegak aturan.

Rahmat Bagja selaku pimpinan Badan Pengawas Pemilu meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada semua instansi buat mensosialisasikan wacana netralitas di media sosial ini pada ASN masing-masing.³ Upaya pencegahan itu dibutuhkan mampu menekan jumlah perkara pelanggaran netralitas waktu Pemilu 2024. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun memprediksi polarisasi atau pembelahan rakyat bakal permanen terjadi saat gelaran Pemilu 2024. Intensitas polarisasinya akan sangat ditentukan oleh jumlah pasangan capres-cawapre.⁴

¹ John T. Jost, Delia S., James N., "Cognitive-motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts" *National Library Medicine, Nat Rev Psikol.* 1 Agustus 2022

² Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 11, No. 1, Juni 2023. Hlm. 10.

³ Rahmat Bagja, <https://bawaslu.go.id/id/berita/ingatkan-soal-netralitas-bawaslu-minta-asn-hati-hati-saat-foto-bersama-peserta-pemilu>

⁴ Ujang Komarudin, <https://nasional.sindonews.com/read/1253851/12/pengamat-sebut-anggapan-polisi-tak-netral-tak-sehat-dan-bisa-ganggu-pemilu-1700205099>

2. METODE PENELITIAN

Artikel kami yang berjudul upaya pencegahan polarisasi politik di tahun politik 2024 menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang berlandaskan pada metode penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Fokus penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggali pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.⁵ Selain itu menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang mengkaji literatur-literatur seperti, tinjauan keperpustakaan, pengumpulan buku-buku atau jurnal ilmiah serta bahan-bahan tertulis relevan yang berkaitan dengan materi polarisasi politik di tahun pemilu 2024. Data tersebut diolah dan dideskripsikan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Pengertian Polarisasi Politik

Polarisasi politik merupakan salah satu istilah yang sering kita dengar belakangan ini dalam dunia politik. Kata Polarisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, magnetisasi, pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Dengan kata lain polarisasi merupakan pembagian masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka atau perbedaan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Polarisasi politik merujuk kepada terpecahnya Masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan.⁶ Ilmuwan politik membagi dua tingkatan polarisasi politik yaitu polarisasi elit dan polarisasi massa, polarisasi elit berpusat pada polarisasi elit politik seperti pengurus partai dan pejabat terpilih. Sedangkan polarisasi massa berfokus pada massa seperti para pemilih atau Masyarakat umum.

Polarisasi tak hanya terjadi di Indonesia saja, polarisasi juga terjadi di negara-negara dunia seperti Amerika dan Inggris. Polarisasi politik dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam pemilihan umum, kebijakan publik, maupun isi-isi sosial budaya.⁷ Pada masa pemilihan umum polarisasi sering terjadi dan mencerminkan perpecahan antara partai politik dengan pendukung mereka. Perbedaan pemahaman dan tujuan diantara partai-partai politik dapat menyebabkan polarisasi yang intens, dimana Masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan. Penyebab terjadinya polarisasi politik antara lain partai politik, media massa, pemekaran wilayah, konteks politik dan ideologi politik Masyarakat.

Polarisasi politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru lagi, pada era orde baru dan reformasi polarisasi politik sempat mereda. Namun, polarisasi kembali muncul pada tahun 2014 dan berlanjut sampai tahun 2019, sejak tahun itu juga Indonesia menghadapi polarisasi politik yang sangat mengkhawatirkan setiap kali berlangsungnya pemilihan umum baik pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta.⁸ Perpaduan antara populisme, politik identitas, dan hoaks melahirkan polarisasi yang tajam. Hasil Pilpres 2019 menghasilkan dua potret baru. Semakin besar pemilih muslim di suatu provinsi maka semakin besar suara Prabowo-Sandi. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak pemilih non-muslim di suatu provinsi maka semakin banyak suara yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kuatnya polarisasi mengakibatkan kampanye berbasis programatik tidak laku. Polarisasi politik hasil pemilu 2019 juga melahirkan sikap partisan yang membabi buta sehingga menghilangkan kejernihan dalam bernalar.⁹ Akibat dari pilpres menyebabkan mendukung Jokowi dan Prabowo kehilangan daya kritis dalam menilai fakta.

3.2. Dampak positif dan negatif dalam polarisasi politik

Polarisasi politik terjadi apabila masyarakat terpecah menjadi 2 kubu yang saling berlawanan baik dalam penentuan, pemilihan, sudut pandang, kepercayaan serta ideologi dalam

⁵ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm 11.

⁶ Ibnu Chaerul Mansyur, Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka, vol 11, *Jurnal Politik Profetik*, 2023, hlm 5.

⁷ Isrofiyah Laela Khasanah dan Fadli Zumadila Wawuan, Polarisasi Politik dan Rekonsiliasi Melalui Halal Bihalal, vol 7, *Jurnal Ilmu Muqoddimah*, 2023, hlm 423.

⁸ Abdul Gaffar Karim, Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset, vol 10, *Jurnal Ilmu Politik*, 2019, hlm 220.

⁹ Burhanuddin Muhtadi, *Bergerak-Bergerak Berdampak: Agar Polarisasi Tak Jadi Normalitas Dalam Politik Kita*, (Jakarta: Narasi, 2020), hlm 29.

menentukan pilihan masyarakat atau bisa disebut masyarakat yang beranggapan politik ini sebagai kita vs mereka. Hal ini didasari oleh 2 kubu yang saling berlawanan, memiliki fanatisme yang sangat tinggi terhadap pilihannya serta adanya perbedaan pendapat atas pilihannya. Menurut Carothers & O'Donohue (2019) polarisasi politik yang rusak adalah sebuah proses yang paling sering didorong oleh satu perpecahan politik yang mendominasi kehidupan politik yang pluralistik, dan mengesampingkan perpecahan lainnya.

Polarisasi politik akan sangat mudah terjadi ketika masyarakat atau para pendukung menghadapi suatu isu, seperti perbedaan ideologi, pilihan dan prinsip suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka kelompok satu akan menganggap bahwa prinsip serta ideologi kelompok yang lain itu cenderung salah dipikiran mereka, begitu pula sebaliknya. Dengan sangat mudahnya masyarakat terbawa oleh isu-isu yang beredar dimasyarakat maka dapat dipastikan pula polarisasi politik akan cepat terjadi tetapi ketika masyarakat dapat bisa memilah dan milih isu yang berdasar dan tidak terlalu fanatik terhadap pilihannya, hal itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah polarisasi politik di Indonesia.

Dampak dari terjadinya polarisasi politik sangatlah fatal. dilihat dari makna polarisasi juga kita bisa memahami, bahwa ketika terjadinya hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan yang saling bertentangan, permusuhan diantara kedua belah pihak, serta dapat terjadinya kekerasan dari kelompok-kelompok yang berlawanan dengan prinsip kelompoknya tersebut. Hal ini dapat merugikan demokrasi yang ada di Indonesia. Berikut beberapa dampak yang dapat disebabkan terjadinya polarisasi politik:

- Terciptanya perpecahan

Dilihat dari segi historis Pemilu di tahun 2014 sampai pemilu tahun 2019, yang mana di awal tahun Pemilu 2014 sudah terciptanya polarisasi politik hingga berlanjut sampai ke pemilu berikutnya. Pada tahun 2019 polarisasi politik semakin berlanjut, kenapa? Karena Masyarakat Indonesia sudah terpecah menjadi 2 kubu. Yakni kubu pro Jokowi dan kubu Pro Prabowo. Pada saat tahun 2019 kubu pro Jokowi dan kubu pro Prabowo kian memanas, banyak Masyarakat yang pro Prabowo menyindir kepemimpinan Presiden Jokowi saat itu, dan mereka sampai membuat grup dan meramaikan *hashtag* di sosial media #2019GantiPresiden. Hal ini tentu membuat perselisihan diantara 2 kubu, lalu dari pihak pendukung presiden Jokowi juga membalas dengan membuat grup dan meramaikan *hashtag* di sosial media #2019TetapJokowi. Dengan dibuatnya grup dan *hashtag* tersebut perlawanan semakin kian memanas, tujuan awal pembuatan grup ialah sebagai wadah para pendukung untuk berdiskusi serta memberi dukungan kepada pasangan tersebut. Dari grup tersebut tidak hanya memberikan stigma yang positif melainkan ada juga yang memberikan stigma negatif terhadap pendukung kelompok lainnya.

Dapat kita pahami bahwa polarisasi politik itu bisa membuat perpecahan dinegara Indonesia, dengan kefanatikan pendukung tertentu bisa menyebabkan perpecahan diantara kedua kelompok, tidak terciptanya pemilu yang damai melainkan terciptanya pemilu yang panas, saling menyebar fitnah, stigma buruk serta adanya ancaman dari salah satu pihak dan lain sebagainya.

- Merusak institusi demokrasi

Adanya polarisasi politik di suatu negara bisa merusak institusi demokrasi. Pada point yang pertama saya menjelaskan bahwa polarisasi bisa membuat 2 kubu yang saling berlawanan dalam pilihannya. Ketika terciptanya polarisasi di suatu negara maka dampak yang bisa terjadi ialah rusaknya institusi demokrasi, karena polarisasi politik bisa menghambat proses pembuatan aturan, kebijakan dan bisa memperkuat posisi salah satu pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal itu tentu saja bisa memicu terjadinya keputusan atau aturan yang merugikan sebagian masyarakat tertentu. Polarisasi mempunyai dampak yang fatal karena dapat membuat kubu pemenang memiliki kekuatan yang besar, sehingga kubu yang kalah tersingkirkan dari pemerintahan.

- Menghilangnya kredibilitas partai politik

Kepercayaan Masyarakat terhadap partai politik disuatu negara juga bisa menurun akibat terjadinya polarisasi. Karena apa? Karena polarisasi politik dapat membuat minat Masyarakat terhadap politik menurun disebabkan semua kendali dipegang oleh pihak pemenang dan ini membuat Masyarakat tidak puas sehingga bisa menimbulkan aksi demonstrasi dari Masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidakpuasan dari pemerintahan itu.

- Berdampak Terhadap Pemerintahan

Polarisasi terbentuk dengan membuat kompromi, konsensus, interaksi, dan tidak adanya toleransi bagi individu dan aktor politik di kedua kubu yang berbeda.¹⁰ Polarisasi yang merusak

¹⁰ Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018). "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century"

sering kali melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi, merusak proses dasar legislatif, melemahkan sifat peradilan yang non-partisan, dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini memperburuk intoleransi dan diskriminasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kekerasan di seluruh masyarakat serta berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi.¹¹

Dalam kasus polarisasi politik yang merugikan di setiap negara, sering kali pihak yang menang mengecualikan pihak yang kalah dari posisi kekuasaan atau menggunakan cara untuk mencegah pihak yang kalah menjadi ancaman di masa depan. Dalam situasi seperti ini, pihak yang kalah biasanya mempertanyakan legitimasi institusi yang membiarkan pihak yang menang menciptakan hegemoni, yang menyebabkan masyarakat semakin sinis terhadap politik. Di negara-negara ini, polarisasi politik sering dilihat sebagai permainan kekuasaan yang mengacu pada diri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat.¹²

- Menurunnya Kredibilitas Masyarakat

Masyarakat yang terpolarisasi sering menyaksikan kontroversi publik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dapat dibuktikan secara faktual. Selama proses ini, fakta dan kebenaran moral semakin kehilangan bobotnya, karena semakin banyak orang yang menyesuaikan diri dengan pesan-pesan dari kelompok mereka sendiri. Pelaku sosial dan politik seperti jurnalis, akademisi, dan politisi terlibat dalam penyampaian cerita yang bersifat partisan atau menanggung kerugian sosial, politik, dan ekonomi yang semakin besar. Para pemilih kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Dukungan terhadap norma dan demokrasi menurun. Semakin sulit bagi masyarakat untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dengan mengacu pada kebenaran atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan partai.¹³

Setelah penjelasan mengenai dampak negatif dari polarisasi politik yang terjadi, tentu setiap suatu hal tidak hanya menimbulkan hal yang negatif saja, namun juga ada hal positif yang terkandung di dalam polarisasi politik. Berikut dampak positif bila terjadinya polarisasi politik :

- Memperkuat Hubungan

Polarisasi politik dapat berfungsi untuk menyatukan, memperkuat, atau memobilisasi calon sekutu di tingkat elit dan massa. Hal ini juga dapat membantu memecah belah, melemahkan, atau menenangkan pesaing. Bahkan gerakan sosial yang paling terkenal pun dapat digambarkan sebagai "sekelompok orang yang terlibat dalam suatu konflik dengan lawan-lawannya yang jelas dan memiliki orientasi konflik terhadap lawannya dan memiliki identitas yang sama." Tetapi polarisasi politik ini menunjukkan nilai-nilai solidaritas dari 1 kubu, memperkuat kubu mereka untuk mencapai tujuannya yaitu kemenangan.

Polarisasi politik juga dapat memberikan solusi masalah pemungutan suara untuk membantu pemilih memilih kandidat, memungkinkan partai politik memobilisasi pendukungnya dan memberikan pilihan terprogram. Polarisasi politik juga dapat membantu mengatasi perbedaan internal dan membentuk identitas bersama, yang sebagian didasarkan pada oposisi bersama terhadap mereka yang menolak reformasi. Namun, polarisasi dapat menjadi alat politik yang berisiko bahkan ketika dimaksudkan sebagai instrumen demokratisasi, karena hal ini berisiko menjadi merugikan dan menyebarkan diri sendiri.

- Meningkatkan Partisipasi dalam politik

Sebagian masyarakat menilai polarisasi politik selalu buruk, namun ketika melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, polarisasi politik bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai berita terkini terhadap para calon pemimpin. Dalam pemilu tahun 2014 banyak yang menyaksikan bahwa Pilpres Tahun 2014 telah banyak membelah ikatan keluarga dan teman. Namun, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mereka sampai 70%, hak pilih ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun pemilu sebelumnya. Begitu pula ketika pemilihan gubernur di DKI Jakarta 2017 lalu, masyarakat banyak yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih mereka, dan hasil dari masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sampai 78%. Tentu penggunaan hak pilih masyarakat ini cenderung lebih tinggi dibandingkan pemilihan gubernur di tahun 2012 yang angka partisipasi masyarakat hanya mencapai 66,7 % ini menunjukkan bahwa polarisasi politik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihan suara untuk mendukung pilihan mereka menang.

¹¹ "Democracies Divided". Brookings.

¹² Vegetti, Federico. "The Political Nature of Ideological Polarization: The Case of Hungary". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*.

¹³ Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018). "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century"

Selain itu juga, banyak masyarakat yang sudah mulai sadar untuk memahami politik dan mereka mulai mencari tahu para kandidat calon lalu memikirkan kebijakan apa saja yang akan ditawarkan para calon kandidat tersebut dan masyarakat juga berpartisipasi dalam kampanye untuk kandidat yang mereka dukung. serta para *voters* (pemilih) menjadi lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah lalu mereka yang mendukung kandidat calonnya mendukung penuh kinerja calonnya tersebut, tetapi untuk calon yang tidak mereka dukung masyarakat cenderung memberi kritik terus menerus atas kebijakan yang ingin di lalukannya ketika terpilih menjadi presiden nantinya.

Di era digital seperti sekarang, para pendukung sangat mudah untuk menyebarkan opini mereka terhadap para calon, dan mereka pun bisa menyebarkan isu-isu positif serta bisa menyebarkan isu-isu yang negatif tetapi mereka juga bisa pro dan kontra terkait kebijakan yang akan dibuat oleh para calon tersebut melalui media sosial. Semua hal yang terkait dengan polarisasi politik ada sebab akibatnya serta ada baik buruknya. Maka kita harus bisa mengambil kebaikannya dan mencegah keburukannya. Karena apa manfaat yang terkandung dalam polarisasi politik ialah membuat ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi di politik serta memiliki sikap ingin tau atas kebijakan apa yang akan ditawarkan para kandidat dan dampak negatifnya dapat membuat para pendukung calon terpecah belah karena kefanatikannya terhadap calon yang akan didukungnya.

3.3. Upaya pencegahan dalam polarisasi politik di Pemilu 2024

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi salah satu cirinya dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan diselenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif (DPR RI, DPRD, dan DPD). Setiap tahapan pemilu utamanya saat kampanye selalu terjadi polarisasi politik. Polarisasi politik sampai kini masih menjadi sebuah ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia menjelang Pemilu 2024. Adapun upaya pencegahan polarisasi politik menjelang pemilu 2024 antara lain:

1. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila

Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila di dalam pemahaman dan pandangan masyarakat di Indonesia bisa menjadi metode pencegahan dan penyelesaian perihal polarisasi politik yang ada di Indonesia. Menurut Emilia Palonen, polarisasi politik merupakan alat politik yang diartikan untuk membatasi batas antara “kita” dan “mereka” dan untuk memata-matai kelompok yang dirasa sebagai tatanan moral.¹⁴ Inti polarisasi politik ialah sejauh mana masyarakat mempunyai tanggapan yang dominan dan bermoral terhadap desas-desus sosial serta politik. Secara universal, tanggapan yang kuat condong relatif bertahan terhadap isu sosial, stabil dari masa ke masa, juga mempengaruhi perilaku dan kognisi yang ada. Dengan begitu, kepercayaan politik yang didukung masyarakat berdasar pada keyakinan moral yang kuat seringkali susah untuk diubah, menopang perilaku dengan tindakan yang substansial, dan membentuk pondasi intoleransi pada pemahaman yang berlawanan.¹⁵ Polarisasi politik dapat memicu pandangan masyarakat sebagai usaha antara “kita versus mereka,” dan dapat menciptakan konflik timbal balik antara kelompok maupun komunitas yang bertentangan secara ideologis (misalnya, liberal versus konservatif di Amerika Serikat). (ebrary, 2021).

Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup (*way of life*) apabila nilainya diimplementasikan bisa menjadi solusi dan tidak menimbulkan efek buruk polarisasi politik.¹⁶ Nilai-nilai yang tertera pada rumusan setiap sila yang ada pada pancasila sebagai landasan filosofis yang dipercaya, dianggap serta diyakini suatu (hakikat, nilai-nilai, dan norma-norma) yang paling kongkrit, paling baik, paling adil, paling bijaksana dan paling sesuai sebagai dasar NKRI. Pancasila adalah landasan identitas, moralitas, dan jati diri serta penyelamat bangsa.¹⁷ Pancasila juga memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang kuat sebagai landasan moralitas dan arah Negara atau suatu bangsa, dengan masing-masing sila memiliki

¹⁴ Fernando, Pratiwi, Saifulloh, “Model Penanaman Nilai-nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 Di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022, Hal: 126

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid hal:127.

justifikasi sejarah, rasional, dan aktual yang dipahami, dihayati, diyakini, dan dipraktikkan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dijelaskan sebagai monodualisme ketika menegakan hukum di Indonesia, maksudnya ialah sebagai penerapan *religious justice*, *humanity justice*, dan *social justice* yang menjadi satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan memberi arti nilai tersebut sebagai landasan atau dasar untuk meredam polarisasi politik ditengah masyarakat.¹⁸ Dalam penjabarannya nilai-nilai yang menjadi prioritas dalam meredam maupun mencegah polarisasi politik dalam pemilu mendatang ialah mengutamakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir mengutamakan nilai keadilan sosial. Meskipun beda pilihan dalam mendukung calon presiden, namun ketika kita menerapkan nilai-nilai pancasila maka yang kita utamakan adalah persatuan Indonesia.

Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri masing-masing, maka akan menjadi tameng polarisasi politik yang memiliki dampak negatif pada negara dengan demikian upaya menegakkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian, mencegah dan memberantas segala pelanggaran dan tindak kejahatan, yang tak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara.¹⁹

Nilai-nilai yang ada pada dasar Pancasila dimanifestasikan sebagai cita-cita dan juga prinsip hukum, sebagai bentuk kongkrit dan rumusan untuk mencapai keadilan, melindungi segenap bangsa, dan tumpah darah seluruh masyarakat Indonesia. Asas-asas Demokrasi Pancasila ialah budaya kebebasan rakyat yang mempunyai karakteristik khas Nusantara yang mempunyai prinsip-prinsip tertentu.²⁰ Prinsip-prinsip pokok pada demokrasi bisa dikatakan sebagai berikut:

- a. Demokrasi memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Pengambilan ketetapan yang mesti dijalankan dengan musyawarah mufakat;
- c. Badan/Lembaga peradilan merdeka;
- d. Adanya Partai Politik sebagai media mewujudkan cita-cita bangsa dan tempat disalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Berfungsi Sebagai pelaksana Pemilu;
- f. Kedaulatan tertinggi dimiliki rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD
- g. 1945);
- h. Terciptanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban;
- i. Dilaksanakannya Demokrasi yang bertanggung jawab dibarengi moral yang telah diatur Tuhan,serta mempunyai adab terhadap diri sendiri, masyarakat, serta Negara ataupun diluar itu;
- j. Memprioritaskan tujuan dan juga cita-cita bangsa;
- k. Pemerintah yang patuh pada hukum.²¹

2. Menanamkan dan Mengimplementasikan Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika

Politik identitas telah membuktikan menghadirkan polarisasi yang runcing. Hasil survei Exit poll Indikator Politik dengan 2.975 responden yang baru mencoblos pada 17 April 2019 memaparkan bagaimana terbelahnya kelompok-kelompok masyarakat. Permasalahan SARA menjadi hal yang sensitif sebagai alat kampanye. Penggunaan isu SARA dalam berkampanye memiliki akibat besar yang dapat ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang mempunyai tujuan terciptanya perpecahan di Indonesia. Jika masalah ini tak dapat diselesaikan, cita semangat persatuan dan kesatuan tidak terwujud yang malah meningkatkan potensi terjadinya polarisasi masyarakat bahkan elite politik.²²

NKRI adalah bangsa yang majemuk terdiri dari beraneka suku bangsa, ras, budaya, agama dan memiliki wilayah yang luas. Dalam merealisasikan kehidupan berbangsa, negara Indonesia memiliki pondasi yang dikenal dengan pilar-pilar kebangsaan atau 4 (empat) konsensus dasar berbangsa.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid.

²² Maryono, "Implementasi Nilai Keharmoisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024", KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 2 Juni 2023 Hal: 144

Empat Konsensus Dasar Berbangsa ialah hakikat nilai-nilai kebangsaan yang berdasar dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.²³

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kesepakatan dasar yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu. Keberadaan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika diantaranya adanya nilai toleransi, nilai gotong-royong, dan nilai keharmonisan. Nilai Toleransi ialah memahami serta mengimplementasikan arti dari perbedaan yang menopang terciptanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Toleransi serta mewujudkan kerukunan di masyarakat, bisa diwujudkan dan dikembangkan lewat beberapa cara pendekatan antara lain menciptakan dan membangun dialog, melalui lembaga pendidikan maupun non lembaga formal dan juga seni budaya.²⁴ Nilai keharmonisan sebagai penunjuk dari sikap keharmonisan dalam melangsungkan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, serta bernegara, sebagai konsekuensi dari heterogenitas bangsa Indonesia, dimulai dari etnis, suku, budaya, ras, agama, serta kepercayaan untuk menghasilkan negara yang adil, aman, tertib, dan damai. Sedangkan nilai gotong royong merupakan identitas dan budaya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu ciri khas bangsa dan yang telah tumbuh sejak lahir sebagai akar yang kokoh dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁵ Penelitian Nukman, A., & Romadhon, D. (2021) memperlihatkan bahwa terwujudnya nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika begitu penting dalam menggelar Pemilu dan Pilkada.²⁶ Nilai-nilai keharmonisan tadi berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, mengurangi polarisasi, serta mencegah konflik yang bisa saja terjadi yang diakibatkan politik identitas, *hoax*, serta ujaran kebencian. Dalam studi literatur lain dari pada itu juga menunjukkan bahwa politik identitas, *hoax*, serta ujaran kebencian mempunyai pengaruh besar dalam Pemilu dan juga Pilkada. Penggunaan politik identitas yang melampui, penyebaran *hoax*, serta ujaran kebencian memperkuat polarisasi, memunculkan konflik sosial, dan mengganggu integritas serta legitimasi Pilkada bahkan Pemilu. Lain dari pada itu, pentingnya untuk mengambil aksi yang kongkrit untuk mencegah bahkan mengatasi politik identitas, *hoax*, dan ujaran kebencian dalam Pemilu dan Pilkada. Selanjutnya upaya yang bisa dilakukan ialah meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan akan sadarnya nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika, dan mengintensifkan pengawasan terhadap penyebaran *hoax* serta ujaran kebencian.

Semua nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika mesti diimplementasikan agar langsung dirasakan manfaatnya dalam mendirikan kehidupan yang harmonis. Widyawati, R., & Wahyuni, S. (2020). Perwujudan nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkuat kesatuan dan sikap saling menghargai keragaman di Nusantara. Perwujudan nilai keharmonisan bisa direalisasikan dengan dialog yang menciptakan sikap saling mengenali, memahami, dan menghargai serta menghormati. Menghormati dan saling menyayangi, beretika, menggunakan tutur kata yang baik, berlaku tertib, menghargai hak masing-masing individu serta hak publik. Dalam konteks Pemilu, perwujudan nilai keharmonisan sangat krusial untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi mendatang tahun 2024. Implementasi nilai keharmonisan bisa direalisasikan dengan saling menghormati dan menghargai meskipun berbeda pilihan namun tetap memiliki tujuan yang sama yakni persatuan dan hidup rukun dalam bangsa Indonesia.²⁷

3. Partai Politik Sebagai Pendukung Tata Kelola Pemerintah dan Warga Negara yang Baik

Menurut Philippe C. Schmitter's dalam tata kenegaraan yang melakukan proses konsolidasi demokrasi ada 3 (tiga) aktor penting yang menjadi perantara atas tersalurkan kepentingan masyarakat yaitu Parpol (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan yang terakhir gerakan sosial (*the social movements*).²⁸ Fungsi Parpol sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, pertama di wadah internal organisasi dan kedua di wadah eksternal organisasi. Pokok pada internal organisasi yakni Parpol mempunyai peran organisasi amat penting dalam membina, memberi pembekalan serta kaderisasi agar Parpol menjadi lebih kokoh. Fungsi Parpol yang kedua yakni pada wadah eksternal organisasi, yang mana organisasi ini mesti memiliki peran bagi rakyat, bangsa dan juga negara agar terciptanya moral dan etika yang senantiasa terjaga dimasyarakat.²⁹

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid. Hal 145

²⁸ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 4, (Desember 2019), hlm. 703-705.

²⁹ Firmazah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2008), hlm. 69.

Partai politik mesti aktif dalam memainkan perannya karena parpol memiliki peran khusus supaya pemilu dapat berjalan secara demokratis. Peranan penting parpol memposisikan parpol pada posisi pusat (*political centrality*).³⁰ Posisi pusat ini mempunyai 2 dimensi: *Pertama*, Ketika Parpol telah berhasil mengagregasikan segala kepentingan serta nilai yang ada di masyarakat, partai politik kemudian merealisasikannya dalam memanifestasikannya sebagai agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Parpol dapat menarik banyak atensi dari rakyat sehingga parpol meraih banyak kursi di parlemen.³¹ partai politik berperan dalam legislasi dan mengimplimentasikan kebijakan publik.³² *Kedua*, Parpol merupakan satu-satunya bagian yang bisa menerjemahkan keperluan dan nilai dalam masyarakat menuju wadah legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Semua ini dapat parpol terapkan setelah mereka mendapatkan posisi yang strategis dan kuat didalam parlemen di daerah maupun dilingkup nasional.³³

Di antara banyak fungsi pokok demokrasi yang dijalankan partai politik, ada 5 (lima) aspek yang sangat krusial: Mengagregasikan kepentingan setiap individu dan memperhatikan nilai-nilai dari berbagai golongan masyarakat, mempelajari, menciptakan, dan mempublikasikan serta memperkenalkan pada seluruh rakyat platform pemilu partai politik mereka, mengatur tata cara pembentukan cita-cita politis (*political will*) dengan mengusulkan pilihan-pilihan kebijakan yang kian tertata dengan baik, merekrut, memberi bimbingan, dan memperhatikan staf yang kompeten dirasa cocok untuk kantor publik serta mengambil langkah strategis agar bisa mendapat kursi parlemen seta memperhatikan nurani rakyat dengan memanusiakan manusia, memberi arahan, dan juga menawarkan kepada anggota lain yang dirasa efektif nantinya dalam ajang antar pemilu.³⁴

Pada dasarnya sistem demokrasi mewajibkan semua parpol untuk senantiasa menerapkan demokrasi internal. Perihal ini mestinya ada dalam regulasi yang nanti mengakibatkan berjalannya demokrasi internal tak bergantung pada kemauan pemimpin partai tersebut maupun dari doktrin yang ada.³⁵ Demokratisasi internal menanggung adanya kebebasan berpendapat secara terbuka dalam proses membentuk kebijakan politik. Dalam lingkup parpol mesti ada sistem pemilu bebas sebagai alternatif pergantian anggota yang dilangsungkan secara adil serta nantinya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pemerintah dan rakyat.³⁶

Prinsip-prinsip yang mesti ada dalam pembentukan *good governance* ialah demokratisasi, supremasi hukum (*rule of law*), konsensus, daya tanggap, akuntabilitas, kesetaraan sosial atau kesamaan, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas.³⁷ Apabila fungsi partai politik layaknya komunikasi, sosialisai dan juga pendidikan politik terealisasi dengan baik membentuk partisipasi dalam masyarakat untuk selalu berkontribusi dalam proses politik pemerintahan yang menghasilkan peningkatan dan terbentuknya rakyat yang *good citizen*.³⁸

Good citizen nantinya berfungsi saat proses pemilu kemudian juga berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam proses kontrol sosial terhadap berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang nantinya telah dibuat pemerintah dengan begitu menciptakan sistem pemerintahan yang tak dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan parpol-parpol tertentu ataupun lembaga-lembaga pemerintah berada diluar kepentingan bersama.³⁹ Dengan demikian pemerintah dan parpol dituntut agar lebih aspiratif atau selaras dengan kepentingan rakyat yang dibutuhkan negara dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya yang menjadi faktor pendukung terciptanya *good governance*.⁴⁰

4. KESIMPULAN

Polarisasi merupakan perbedaan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik, dalam perbedaan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan bahkan bentrokan antar pendukung. Polarisasi tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara-negara lain. Polarisasi

³⁰ Yani Susilawati, "Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024", *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, (Volume 2 No. 2, Juli 2023) Hal: 116

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, (Jakarta: FES, 2012), hlm. 28.

³⁴ *Opcit.* Hal: 117

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Opcit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

sering terjadi ketika masa-masa pemilu yang mana timbul perpecahan antara partai politik dan pendukung mereka. polarisasi politik dapat terjadi diberbagai konteks seperti dalam pemilu, kebijakan publik, isu-isu sosial budaya termasuk isu pasca debat Capres dan Cawapres. Penyebab terjadinya polarisasi politik tak lain adalah partai politik, media massa, pemekaran wilayah, konteks politik dan ideologi politik masyarakat. Polarisasi politik di Indonesia bukan hal yang baru terjadi, namun sudah sejak era orde baru sampai reformasi dan muncul kembali pada tahun 2014 dan berlanjut sampai tahun 2019. Oleh karena itu, sejak tahun itu Indonesia mengalami polarisasi politik yang sangat ekstrim setiap kali berlangsungnya pemilu baik ditingkat ibukota maupun tingkat daerah. Polarisasi Politik mempunyai dampak positif dan negatif. Namun dari kedua dampak tersebut lebih banyak dampak negatifnya. Dampak negatif yang dapat disebabkan terjadinya polarisasi politik yaitu Terciptanya perpecahan, Merusak institusi demokrasi, Menghilangnya kredibilitas partai politik, Berdampak terhadap pemerintahan, serta Menurunnya Kredibilitas Masyarakat sedangkan dampak positif hal dari polarisasi politik yaitu memperkuat hubungan dan Meningkatkan partisipasi dalam politik. Polarisasi politik akan sangat mudah terjadi ketika masyarakat atau para pendukung mudah terbawa isu-isu yang beredar di masyarakat seperti perbedaan ideologi, pilihan dan prinsip antar satu dengan kubu yang lain. Beberapa hal upaya yang dapat mencegah polarisasi politik, yaitu: masyarakat harus dapat memilah dan milih isu yang beredar dan tidak terlalu fanatik terhadap pilihannya, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, dan mengimplementasikan nilai harmonisasi Bhineka Tunggal Ika.

REFERENCES

- Abdul Gaffar Karim. 2019. Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset, vol 10, Jurnal Ilmu Politik.
- Bayu Dwi Anggon, (Desember 2019). "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila" Jurnal Konstitusi, Vol. 16, Nomor 4,
- Burhanuddin Muhtadi. 2020. *Bergerak-Bergerak Berdampak: Agar Polarisasi Tak Jadi Normalitas Dalam Politik Kita*, Jakarta: Narasi.
- ebrary. (2021). What is political polarization?The Psychology of Political Polarization. Ebrary.Net. https://ebrary.net/162605/psychology/what_political_polarization
- ECPS. (2021). Political Polarization. Populismstudies.Org. <https://www.populismstudies.org/Vocabulary/political-polarization/>
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(3), 277.
- Fernando, Pratiwi, Saifulloh, 2022. "Model Penanaman Nilai-nilai Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS.
- Firmazah, 2008, Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibnu Chaerul Mansyur, "Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka", Jurnal Politik Profetik, Vol. 11, No. 1, Juni 2023.
- Ilham Yuli Isdiyanto, 2017. Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
- Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada.
- Isrofiyah Laela Khasanah dan Fadli Zumadila Wawuan. 2023. Polarisasi Politik dan Rekonsiliasi Melalui Halal Bihalal, vol 7, *Jurnal Ilmu Muqoddimah*.
- John T. Jost, Delia S., James N., "Cognitive-motivationalmechanims of political polarization in social-communicative contexts" National Library Medicine, Nat Rev Psikol. 1 Agustus 2022
- Maryono, "Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024", KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 3 No. 2 Juni 2023

-
- Rahmat Bagja, <https://bawaslu.go.id/id/berita/ingatkan-soal-netralitas-bawaslu-minta-asn-hati-hati-saat-foto-bersama-peserta-pemilu>
- Ujang Komarudin, <https://nasional.sindonews.com/read/1253851/12/pengamat-sebut-anggapan-polisi-tak-netral-tak-sehat-dan-bisa-ganggu-pemilu-1700205099>
- Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018). "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century"
- Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018). "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century"
- Thomas Meyer. 2012. Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, Jakarta: FES.
- Vegetti, Federico. "The Political Nature of Ideological Polarization: The Case of Hungary". The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
- Widyawati, R., & Wahyuni, S. (2020). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Representasi Kesatuan dalam Keragaman: Analisis Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(2).
- Yani Susilawati, "Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024", As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, (Volume 2 No. 2, Juli 2023)